

WACANA BAHASA DAN KEKUASAAN DI INDONESIA (DARI PEMILU HINGGA KASUS BANK CENTURY)

Ahmad Nurcholis
STAIN Tulungagung, Jawa Timur

Abstrak: There is a view that male and female speak language contradictively. Female is prone to use cooperative speech act, but male is prone to use the competitive one. The use of language which is gender-base discriminated turns to significantly contribute to the marginalization of women. English which seems to be 'innocent' in this case, as a matter of fact, does not only reflect such 'gender bias' but also immortalize that 'bias'. It turns out that language has 'certain hidden agenda', that is discriminating the male and female. The existance of such gender bias can be traced from the sexist expression found such as (1) assymetry, (2) mark and non mark expression, (3) derogative semantic, and (4) sexism in discourse. There are three theories which can be used to analyze such phenomena, they are domination theory, discrimination theory, and gender analysis theory.

Kata Kunci: Gender, bahasa seksis, pola bahasa, makna sosial bahasa.

UNESCO telah menetapkan momentum Hari Bahasa Ibu Internasional setiap tanggal 21 Februari, tetapi juga memberikan "warning" agar kaum politisi kita mulai menyentuh bahasa lokal dalam melakukan komunikasi politik dengan rakyat yang diwakilinya. Agar bahasa pulih pada fungsi netralnya, walaupun tidaklah salah mutlak jika kekuasaan mengeksploitasinya sebagai alat menuju tujuan politiknya. Karena pada dasarnya perjumpaan antara bahasa dan kekuasaan dimulai setelah para kaum post-strukturalisme seperti Jurgen Habermas, Jean Baudrillard, Antonio Gramsci, Michel Foucault dan lain-lain menegaskan betapa pentingnya relasi antara bahasa dan kekuasaan (Suriasumantri, 2001).

Sebab bahasa pada awalnya bersifat netral yaitu alat komunikasi dan sarana budaya antar manusia yang mempersatukan mereka yang mempergunakan bahasa tersebut. Namun tatkala bahasa dipertemukan dengan kekuasaan, maka ia memiliki fungsi yang dominan yaitu *kepentingan*. Mereka yang memiliki kekuasaan tentunya akan menggunakan bahasa demi kepentingan kekuasaannya (Aslinda, 2007).

Tentunya kita masih ingat bahwa pesta demokrasi di negeri ini telah membuktikan bahasa telah dijadikan sarana kepentingan memikat rakyat. Sebab di negara demokrasi, dimana kekuasaan adalah ditangan rakyat, maka jalan menuju kekuasaan selain melalui jalur birokrasi biasanya ditempuh melalui jalur partai politik. Partai partai politik berusaha untuk merebut konstituen dalam masa pemilu. Partai politik selanjutnya mengirimkan calon anggota untuk

mewakili partainya dalam lembaga legislatif. Dalam pemilihan umum legislatif secara langsung seperti yang terjadi di Indonesia dalam Pemilu 2009 maka calon anggota legislatif dipilih langsung oleh rakyat.

Itulah sebabnya Ronald Wardhaugh mengatakan : "*Language is also a medium of domination and power*" yang artinya adalah bahasa juga merupakan sarana untuk kekuasaan (Latief, ..). Bahasa politik sangat erat kaitannya dengan upaya untuk merebut simpati rakyat. Ia hadir dan dibutuhkan untuk menumbuhkan pencitraan tertentu agar rakyat terpengaruh dan tersugesti oleh propaganda dan ikon-ikon politik yang mereka tawarkan. Dalam konteks demikian, seorang politisi yang cerdas, dengan sendirinya perlu memiliki kecerdasan linguistik dalam upaya membangun komunikasi dan interaksi dengan publik. Ini artinya, tuturan (*speech*) politik yang mereka lontarkan idealnya mengandung muatan dan misi kerakyatan melalui bahasa yang sederhana, gampang dicerna, dan terhindar dari kesan bombastis.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah realitas hubungan antara bahasa dan kekuasaan?

Sejauh mana para penguasa menggunakan bahasa sebagai kepentingan politik mereka?

Bagaimanakah dampak hubungan Bahasa dan Kekuasaan?

DEFENISI BAHASA DAN KEKUASAAN

Terdapat banyak definisi tentang bahasa, Ronald Wardhaugh (1986) misalnya memberikan definisi yang menurutnya komprehensif dengan pernyataannya : " Bahasa adalah apa yang anggota masyarakat tertentu ucapkan" (*a language is what the members of particular society speak*). Sedangkan Ibnu Jinny mengatakan bahwa bahasa adalah rangkaian dari bunyi-bunyi yang kemudian digunakan setiap masyarakat untuk mengungkapkan maksud mereka (*ashwaat yu'abbiru biha kullu qawm 'an aghraadlihim*) (Ibnu Jinni, 1957).

Bahasa yang pada awalnya secara konvensional merupakan sistem lambang yang terurai mulai dari unit yang paling kecil, yakni bunyi (phones), yang dikaji oleh phonology, morfem (morphemes) dan kata (words) yang dikaji oleh morphology, yang kodifikasinya dikembangkan lebih lanjut melalui leksikologi dan leksikografi, frase (phrases), klausa (clauses) dan kalimat (sentences), yang dikaji oleh syntax, makna (meanings) yang dikaji oleh semantics, tanda (signs) yang dikaji oleh semiotics, hingga teks (texts) yang dikaji lewat analisis teks (reading analysis), sedangkan kekuasaan dimaknai sebagai praktik politik oleh para politisi.

Adapun kekuasaan dalam bahasa Inggris disebut *power* yang menurut Norman Fairclough berarti melakukan pengendalian terhadap rakyat yang kuat dan menghambat kontribusi terhadap rakyat yang lemah (*to do with powerful participants controlling and constraining the contributions of non-powerful participants*). Bentuk-bentuk pengendalian ini dikemukakan oleh Antonio Gramsci dengan menawarkan istilah *hegemoni* (*hegemony*) yang diperhadapkan pada istilah *kekuatan* (*force*)(Latief,...), kekuatan diartikan sebagai penggunaan daya paksa untuk membuat orang banyak mengikuti dan mematuhi syarat-

syarat suatu cara produksi tertentu, sedangkan hegemoni berarti perluasan dan pelestarian "kepatuhan aktif" dari kelompok-kelompok yang didominasi oleh pihak yang berkuasa lewat penggunaan intelektual, moral, politik, dan ideologis. Hegemoni bukan dominasi dengan menggunakan kekuatan, melainkan hubungan persetujuan. Itulah sebabnya mengapa orang yang tertindas tidak merasa ditindas.

REALITAS HUBUNGAN BAHASA DAN KEKUASAAN

Kekuasaan cenderung korup adalah ungkapan yang sering kita dengar, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah *Power tends to corrupt*. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Miriam Budiardjo, 2002) atau Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi (Ramlan Surbakti, 1992).

Dalam kekuasaan pemerintahan, bahasa mengambil peran sebagai alat untuk mempengaruhi tingkah laku orang, kelompok lain, atau rakyat sesuai dengan keinginan politik pemerintah. Jika "kekuasaan" didefinisikan sebagai "kemampuan untuk mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu maka sesungguhnya "kewenangan" ini akan mengacu pada klaim legitimasi, pembenaran dan hak untuk melakukan kekuasaan. Sebab dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial, kekuasaan telah dijadikan subjek penelitian dalam berbagai empiris pengaturan, keluarga (kewenangan orangtua), kelompok-kelompok kecil (kewenangan kepemimpinan informal), dalam organisasi seperti sekolah, tentara, industri dan birokrat (birokrasi dalam organisasi pemerintah) dan masyarakat luas atau organisasi inklusif, mulai dari masyarakat yang paling primitif sampai dengan negara, bangsa-bangsa modern atau organisasi (kewenangan politik).

KEKUASAAN BERSIFAT POSITIF DAN BERSIFAT NEGATIF

Kekuasaan bersifat positif adalah kemampuan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada individu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang dapat mempengaruhi dan merubah pemikiran orang lain atau kelompok untuk melakukan suatu tindakan yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan dengan sungguh-sungguh dan atau bukan karena adanya paksaan baik secara fisik maupun mental (Rahardjo, 2002).

Kekuasaan bersifat negatif muncul dari sifat atau watak dari seseorang yang bernuansa arogan, egois, serta apatis dalam mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh pemegang kuasa dengan cara paksaan atau tekanan baik secara fisik maupun mental. Biasanya pemegang kekuasaan yang bersifat negatif ini tidak memiliki kecerdasan intelektual dan emosional yang baik, mereka hanya berfikir pendek dalam mengambil keputusan tanpa melakukan pemikiran yang tajam dalam mengambil suatu tindakan, bahkan mereka sendiri terkadang tidak dapat

menjalankan segala perintah yang mereka perintahkan kepada orang atau kelompok yang berada di bawah kekuasaannya karena keterbatasan daya pikir tadi, dan biasanya kekuasaan dengan karakter negatif tersebut hanya mencari keuntungan pribadi atau golongan di atas kekuasaannya itu. karena mereka tidak memiliki kemampuan atau modal apapun selain kekuasaan untuk menghasilkan apapun, dan para pemegang kekuasaan bersifat negatif tersebut biasanya tidak akan berlangsung lama karena tidak akan mendapatkan dukungan sepenuhnya oleh rakyatnya.

BAHASA MEMIKAT RAKYAT PADA PEMILU 2009

Memikat rakyat untuk memilih anggota Legeslatif hingga Presiden tentunya adalah dengan menggunakan bahasa. Oleh para ahli, pemilahan bahasa guna mempengaruhi public sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan politik, melahirkan apa yang kemudian disebut dengan linguistik deskriptif (*descriptive linguistics*) yang pusat kajiannya adalah *behaviour*, *contents* dan *elements* bahasa yang kemudian dikenal sebagai “*pure linguistics (micro linguistics)*”. Selain makna bahasa terasa sempit, pemilahan tersebut melahirkan formalisme dalam linguistik, sehingga linguistik seolah hanya berjalan di atas satu rel saja. Sayangnya, formalisme begitu mendominasi para linguis di Indonesia dalam waktu yang cukup lama hingga awal 1960’an.

Saat kita menguraikan konsep kekuasaan politik kita perlu melihat pada kedua elemennya, yakni kekuasaan dari akar kata [kuasa](#) dan [politik](#) yang berasal dari [bahasa Yunani](#) *Politeia* (berarti kiat memimpin [kota](#) (*polis*)). Sedangkan kuasa dan kekuasaan kerap dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat gerak yang tanpa kehadiran kuasa (kekuasaan) tidak akan terjadi, misalnya kita bisa menyuruh adik kita berdiri yang tak akan dia lakukan tanpa perintah kita (untuk saat itu) maka kita memiliki kekuasaan atas adik kita. Kekuasaan politik dengan demikian adalah kemampuan untuk membuat masyarakat dan negara membuat keputusan yang tanpa kehadiran kekuasaan tersebut tidak akan dibuat oleh mereka.

Bahasa pemikat (*descriptive linguistics*) yang digunakan dalam pemilu 2009 antara lain :

Descriptive Linguistics yang digunakan pada Pemilu 2009

Descriptive Linguistics	Tokoh/Partai	Image Rakyat
Bersama Kita Bisa	SBY	Kebersamaan dalam pluralitas bangsa demi bangkit dari ketertinggalan dengan bangsa lain.
Jujur dan Bersih	PKS	Menuju pemerintahan yang amanat dan bebas dari KKN
Lebih Cepat Lebih Baik	Jusuf Kalla	Penangan masalah dengan cepat dan tepat
Mari Bung Rebut Kembali	Golkar	Merebut kejayaan kembali seperti di masa Orde Baru
Membela Yang	PKB	Upaya bertindak adil bagi rakyat

Benar		
Menuju Ekonomi Kerakyatan	Prabowo Subianto	Memihak kepentingan rakyat
Pendidikan Gratis	Demokrat	Beban rakyat berkurang, rakyat semakin cerdas.
Saatnya Hati Nurani Berbicara	Hanura	Hati nurani pemimpin dan rakyat mampu mewujudkan cita-cita luhur bangsa
Sembako murah	PDI P	Jalan pintas keluar dari krisis ekonomi

Pada saat itulah para wakil rakyat sangat piawai menggunakan segenap kecerdasan bahasanya. Tidak melulu untuk menyerang dan melumpuhkan lawan politiknya, tetapi terlebih juga untuk memahami kehendak rakyat yang diwakili. Wakil rakyat adalah "binatang politik" yang tinggal dalam sanubari rakyat, bukan "binatang sungguhan" penghuni kebun binatang". Sesungguhnya bahasa adalah piranti komunikasi universal yang sudah ada sejak peradaban umat manusia itu lahir. Sebagai piranti komunikasi, bahasa akan terus berkembang seiring dengan dinamika zaman dan masyarakat penggunaannya. Bahasa, dengan demikian, akan terus ada dan eksis hadir di tengah-tengah peradaban umat manusia sebagai media komunikasi dan interaksi dalam berbagai ranah kehidupan, termasuk dalam ranah politi

Sudah barang tentu jika seseorang, suatu organisasi, atau suatu partai politik bisa mengorganisasi massa mereka akan memiliki kekuasaan politik. Sedangkan variasi yang dekat dari kekuasaan politik adalah [kewenangan](#) (*authority*), kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kuasa. Sedangkan kekuasaan politik, tidak berdasar dari UU tetapi harus dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku sehingga bisa tetap menjadi penggunaan kekuasaan yang konstitusional.

Namun, sungguh disayangkan, ketika Pemilu sudah menjelang babak-babak akhir, rakyat di negeri ini disuguhi dengan permainan bahasa politik "kekerasan" antarpol atau antarcaleg. Perang iklan di media yang memanas atau maraknya baliho politik melalui tampilan wajah narsis yang elitis dan tidak pede, merupakan salah satu indikator, betapa politisi kita selama ini abai terhadap bahasa politik yang berbasis kerakyatan. Mesin politik yang mereka gunakan untuk mendulang suara rakyat tidak lagi digerakkan dengan semangat dan nurani kerakyatan, tetapi semata-mata untuk menjegal dan melumpuhkan lawan politik yang hendak menjadi rivalnya. Rakyat yang sudah lama menunggu realisasi janji-janji yang selalu digelontorkan dari mimbar-mimbar kampanye justru dikebiri dan dimarginalkan.

Bahasa politik berbasis kerakyatan, dalam konteks ini, merupakan piranti bahasa, baik verbal maupun nonverbal, yang menjadikan rakyat sebagai subjek yang perlu diangkat harkat dan martabatnya menuju nilai-nilai kemanusiaan sejati. Rakyat tak lagi dimanfaatkan dan dimobilisasi untuk kepentingan-kepentingan sempit dan sesaat, tetapi benar-benar memanusiakan mereka melalui konsistensi antara kata dan tindakan. Rakyat tak lagi butuh

janji-janji politik yang mengapung-apung dalam slogan, tetapi butuh realisasi dan bukti konkret. Bukan janji, melainkan bukti. Hiperbolisme dan eufemisme bahasa melalui penggunaan ungkapan yang cenderung manis dan berlebihan justru akan menjadi bumerang bagi politisi kita ketika mereka gagal mewujudkan janji-janji itu.

Pengalaman dari pemilu ke pemilu seharusnya bisa menjadi referensi bagi politisi kita dalam memberikan pengabdian yang terbaik buat rakyat yang diwakilinya. Kalau memang ingin berkomunikasi dengan rakyat, seharusnya mereka bisa menyatu ke tengah-tengah rakyat, mengakrabi mereka dengan santun melalui penggunaan tuturan bahasa politik yang mencerahkan, jelas, gamblang, tidak bersayap, dan apa adanya. Pamor sang politisi juga akan makin bersinar jika kelak bahasa politik yang mereka lontarkan tak sekadar verbalisme belaka, tapi mewujud dalam tindakan dan aksi nyata sehingga membuat rakyat makin bersimpati. Rakyat juga makin cerdas dalam menjatuhkan pilihan-pilihan politik. Jangan salahkan mereka jika dalam Pemilu nanti nama *Sampeyan* tidak dicontreng lantaran gagal membangun komunikasi dan interaksi melalui bahasa politik yang benar-benar berbasis kerakyatan.

BAHASA CARUT MARUT KASUS SKANDAL BANK CENTURY

Kali ini kekuasaan tidak bisa menggunakan bahasa sebagai alat untuk membodohi rakyat. Sebab rakyat semakin cerdas menyikapi kasus tersebut dan tidak bisa ditipu lagi oleh pihak yang telah merugikan Negara. Skandal keuangan di Bank Century terus menggelinding. Kucuran dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp 6,7 triliun ke bank itu diduga berpotensi merugikan negara sebesar Rp 5 triliun. Kasus ini mengingatkan publik pada megaskandal kasus BLBI di tahun 1998. Menurut pengamat hukum bisnis Frans Hendra Winata kasus bail-out Bank Century harus diusut tuntas oleh aparat penegak hukum. Langkah Bank Indonesia dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang meloloskan kucuran dana tersebut dinilai sangat ceroboh.

Bank Indonesia bisa meloloskan kucuran dana 6,7 T, maka harus ada pihak bertanggung jawab dalam kasus ini. Sebab Bail-out ke Bank Century yang disetujui oleh DPR sebagai pemegang APBN hanya Rp 1,3 triliun. Tapi yang kemudian dikucurkan mencapai Rp 6,7 triliun. Komite Stabilitas Sistem Keuangan mengeluarkan enam kali lipat dari persetujuan, jelas hal ini adalah skandal, kriminal, karena mengeluarkan anggaran lebih dari yang disetujui DPR. Di samping soal pengeluaran yang melebihi kesepakatan dengan DPR, ternyata ada permainan antara pemilik bank dengan orang BI. Negara begitu gampang mengeluarkan uang tanpa prosedur yang benar.

Contoh Descriptive Linguistics yang digunakan pada Kasus Bank Century

Descriptive Linguistics	Tokoh Yang Terlibat	Image Rakyat
<i>Bail-out, sistemik, eskalasi,</i> Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	BI	Istilah Perbankan sebagai dalih korupsi terselubung

investigasi keuangan oleh Pansus	Maruarar Sirait dkk	Audit keuangan Negara secara terbuka
Komite Stabilitas Sistem Keuangan	Tim yang dibentuk Presiden	Dugaan keterlibatan Presiden
KPK lemah, Gerakan 1 juta Facebook mendukung KPK	Antasari Ashar dkk	Konspirasi membubarkan KPK
Kucuran dana Rp 6,7 triliun, Bola Liar meloloskan dana.	Sri Mulyani Indrawati, Budiono, Gubernur BI	Merugikan Negara 5 T
Skandal pejabat Polri, Buaya vs Cicak	Susno Duadji	Polri merasa lebih berkuasa dari KPK
Tidak akan ada Pemakzulan Presiden	Taufik Kiemas (Ketua MPR)	Presiden bersih dari tuduhan

DAMPAK HUBUNGAN ANTARA BAHASA DAN KEKUASAAN

Jalaluddin Rakhmat seorang pakar komunikasi menyikapi fenomena hubungan antara bahasa dan Kekuasaan dengan menyatakan bahwa dalam wacana politik, konstruksi sosial sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang berkuasa termasuk dalam hal kebahasaan, penguasa akan mendefinisikan segala hal dan hampir selalu mendefinisikannya untuk makin merugikan pihak yang kurang berkuasa. Dengan demikian, pergantian elit penguasa selalu berpengaruh pada pergantian "bahasa". Di Indonesia ketika terjadi pergantian elit penguasa orde baru oleh Reformasi. Ideologi elit pun berganti, dan pergantian itu dapat kita lihat pada: *pertama*, pergantian daftar kosa kata, *kedua*, pergeseran makna kata (Rahmat,...). Ada sejumlah besar kosa kata dalam politik wacana orde baru yang tidak lagi terdengar pada masa reformasi, kosa kata tersebut tidak pernah terdengar sebagaimana tertera dalam bagan berikut:

Contoh pergeseran kosa kata dan makna

Orde Baru	Reformasi
(OTB) Organisasi Tanpa Bentuk	Caleg Busuk
Anti-pembangunan	GAM
Berangus	HAM
Gebuk	Komisi Yudisial
Komunis	Konversi
Pembangunan	KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
Pembinaan	KPU (Komisi Pemilihan Umum)
Penataran	Partai gurem
Stabilitas nasional	Pilkada
Subversi	Referendum Timor Timur
Tinggal Landas	Reformasi
	Teroris

Realitas hubungan antara penguasa dengan elit tertentu dan masyarakat adalah produk konstruksi sosial politik yang bukan merupakan sesuatu yang

mampu membuat langgeng sebab segala sesuatu selalu diukur berdasarkan kepentingan. Oleh karena itu setiap rezim yang berkuasa menyadari perlunya suatu mekanisme yang memungkinkan realitas keberadaan dirinya beserta segala struktur penunjang kekuasaan yang bisa mendukungnya secara berkesinambungan agar kekuasaannya bisa berjalan sebagai suatu realitas yang seakan-akan *legitimate*, alamiah, wajar, atau sebagai sesuatu yang tak terelakkan. Salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan kebahasaan, secara besar-besaran penguasa memanfaatkan 'kekuatan bahasa' untuk mempengaruhi khalayak agar mendukung kekuasaan dan tindakannya. Dalam kerangka ini teori Hegemoni Gramsci mendapatkan perannya, hegemoni beroperasi melalui penggunaan kosa kata yang konstruktif secara sosial yang disebarkan melalui praktek-praktek kebahasaan setiap hari, baik melalui pidato-pidato acara kenegaraan maupun melalui media surat kabar, jurnal, buku juga melalui media elektronik.

Pergeseran makna juga terjadi pada tiga masa tersebut, seperti kata "politik" yang pada masa orde lama berkonotasi positif berkaitan dengan kegiatan yang mempunyai akses pada struktur kekuasaan, pada masa orde baru sebaliknya kata "politik" dikonotasikan negatif sebab diartikan sebagai kegiatan yang tidak sejalan dengan elit penguasa, kita tidak boleh bicara politik ketika khutbah jumat, walaupun bicara politik maka haruslah dengan nada mendukung, kalau di dalamnya ada kecenderungan mengkritik kebijakan pemerintah maka dianggap bicara politik. Itulah sebabnya Golkar tidak pernah menyebut diri sebagai partai politik, pada masa orde baru pemili hanya diikuti oleh dua partai politik dan satu golongan karya.

Khusus untuk masa orde baru Abdul Chair berhasil mengidentifikasi strategi penguasa menggunakan bahasa untuk mengekalkan kekuasaannya (Chair, 1997):

Kata kunci, yaitu kata-kata yang digunakan oleh penguasa dalam mengungkapkan gagasannya, seperti kata: pembangunan, persatuan dan kesatuan, stabilitas nasional, G30S/PKI, adil dan makmur, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain untuk memberikan makna kunci bahwa mereka yang terbaik dan yang lain tidak baik.

Kata topeng, bahasa dengan eufimisme/penghalusan semantik secara berlebihan sehingga semuanya terasa baik, tetapi makna sesungguhnya tertutup. Misalnya kata pembinaan yang berarti peningkatan kualitas namun pada prakteknya pembinaan diartikan menghambat. Pembinaan terhadap ormas, orsospol, atau parpol diaplikasikan dengan mengeluarkan segala macam kebijakan seperti kewajiban asas tunggal. Kata melindungi industri dalam negeri bukan diartikan sebagai menjaga dari ancaman, melainkan kebebasan konglomerat untuk monopoli dan mempergunakan segala fasilitas negara sesuka hati.

Monopoli semantik adalah penguasa menjadi penafsir tunggal yang memaksakan kehendaknya terhadap suatu teks yang sebetulnya memiliki banyak penafsiran, seperti penafsiran beberapa pasal UUD 1945.

Penghalusan (*eufimisme*), yaitu proses penghalusan makna. Seharusnya eufimisme digunakan dalam pembicaraan agar orang tidak tersinggung, namun oleh penguasa digunakan untuk menutupi keburukannya dengan cara

menyembunyikan makna. Misalnya kata korupsi dihaluskan dengan penyalahgunaan wewenang, masyarakat miskin dihaluskan menjadi kjsata desa tertinggal.

Pengasaran (*puffery*) adalah pengasaran dari suatu konsep. Penguasa memberikan makna yang berlebihan terhadap suatu konsep. Seperti perkataan soeharto "kita adalah bangsa kaya dan paling maju", kata itu membuat rakyat lupa bahwa sebenarnya Indonesia adalah bangsa yang dilanda kemiskinan dan terbelakang, dengan kalimat tersebut masyarakat merasa tidak miskin dan tidak bannyak menuntut.

Bahasa baru (*newspeak*), yaitu manipulasi terhadap pengertian yang lazim ata suatu kata atau istilah, seperti pemilihan umum yang diganti dengan pesta demokrasi sehingga rakyat awam menganggap pemilihan umum hanya keramaian laksana pesta dan melupakan esensi pemilihan umum itu sendiri. Penggolongan berbagai tindakan atau kejadian ke dalam suatu konsep tertentu, seperti unjuk rasa atau pemogokan yang digolongkan sebagai unkonstitusionalis, atau tidak pancasilais, mengkritik kebijakan yang digolongkan menyalahi undang-undang.

Pemberian label, yaitu pemberian nama terhadap suatu tindakan untuk menyudutkannya, seperti gerakan politik umat Islam yang diberi label sparatisme, terorisme, fanatisme, ekstrim kanan, gerakan radikal anti demokrasi dan lain-lain.

KESIMPULAN

Sampai saat ini sudah hampir 50 (lima puluh) tahun bahasa telah dikaji melebihi batas-batas linguistik, yakni wacana dengan memahami makna di balik bahasa. Menurut teori wacana, tidak ada produk linguistik yang hadir dalam ruang hampa dan tiba-tiba, apalagi tanpa makna. Ia hadir dengan tujuan tertentu dan bahkan kuasa tertentu pula. Tidak ada kata yang tidak bermakna. Bahkan, wacana merupakan arena beroperasinya kekuasaan dan relasi kekuasaan. Karena itu menjadi agak mudah bagi kita untuk memahami dua macam kekuasaan menurut Gramsci, yaitu: koersi dan hegemoni, atau dua jenis piranti penguasaan menurut Althusser, yaitu: aparat represif kekuasaan (Repressive state apparatus), dan aparat ideologis kekuasaan (Ideological state apparatus).

Bahkan Jean Baudrillard (dalam Latif dan Ibrahim, 1996) menegaskan bahwa "The real monopoly is never that of technical means, but that of speech". Sejak saat itu, diskusi tentang relasi antara bahasa dan kekuasaan sangat semarak. Sebelumnya kehadiran karya Fairclough (1989) "Language and Power", Benedict Anderson (1990) "Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia", Pierre Bourdieu (1984) "Language and Symbolic Power" juga telah membuka ruang diskusi ilmiah tentang relasi bahasa dan kekuasaan. Sebagai kekuasaan hegemonik yang dibangun melalui kerja aparat ideologis, maka kebanyakan kekuasaan kontemporer beroperasi dalam atau dibangun dan dipelihara melalui praktik wacana (*discursive practice*). Untuk memahaminya diperlukan analisis interteks. Lewat kajian wacana, kita dapat melihat jenis kekuasaan apa yang beroperasi. Namun begitu bisa dilihat bahwa bahasa mempunyai kekuatan yang luar biasa, kita bisa menggunakan bahasa untuk

mencapai tujuan yang kita inginkan. Sebagaimana ilmu pengetahuan, hitam atau putihnya bahasa sangat tergantung pada siapa yang menggunakannya. Dampaknya, penelitian tentang relasi bahasa dan kekuasaan berkembang sehingga melahirkan karya-karya akademik yang cukup banyak berupa makalah dan buku-buku ilmiah. Lebih lanjut, kaum post-strukturalis, juga membuka diri memasuki ranah lain dengan melihat bahasa dari sisi fungsi (*language in use*). Di sini bahasa tidak dilihat sebagai objek yang dideskripsikan semata, melainkan dilihat fungsinya dalam komunikasi, dan dalam kehidupan sosial serta budaya. Menurut saya, justru para kaum post-strukturalis tersebut mengembalikan bahasa pada hakikat dan fungsi yang sesungguhnya. Implikasinya, ilmu bahasa (linguistik) dapat membawa kita ke berbagai ranah kehidupan tempat bahasa digunakan. Misalnya, sebagai teks bahasa hadir dalam ranah seni, budaya, sastra, politik, psikologi, agama, komunikasi, sejarah, antropologi, sosiologi, dan sebagainya. Di sini terjadi apa yang disebut sebagai fungsionalisme dalam linguistik, yang disusul dengan kelahiran disiplin-disiplin baru seperti sosiolinguistik, antropolinguistik, psikolinguistik, politikolinguistik, sosiopolitikolinguistik, geolinguistik, neurolinguistik, komunikasi politik dan seterusnya. Disiplin-disiplin tersebut sering disebut *inter-disciplinary linguistics (macro linguistics)*.

Perkembangan linguistik fungsional juga menuntut para pengkaji bahasa untuk memahami disiplin-disiplin lain seperti sosiologi, bagi pengkaji sosiolinguistik, psikologi bagi pengkaji psikolinguistik, neurologi bagi pengkaji neurolinguistik, antropologi bagi pengkaji antropolinguistik, ilmu politik bagi pengkaji politikolinguistik, teori-teori tentang ideologi media dan teori kritik bagi pengkaji media, semiotika bagi pengkaji komik dan seterusnya. Berikut disajikan pemetaan wilayah kajian bahasa antara formalisme (yang berisi tentang wujud dan bentuk bahasa) dan fungsionalisme (yang berisi tujuan dan fungsibahasa).

Perspektif fungsionalisme mengantar kajian bahasa untuk tidak lagi sekadar mengkaji bahasa, tetapi juga wacana (*discourse*), yaitu bahasa dalam konteks yang beraneka ragam untuk memahami maknanya. Saat ini kita dihadapkan dengan situasi multikulturalisme yang harus kita pahami secara lebih baik. Jika tidak, akan terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sebab, bahasa yang digunakan manusia makin terserap oleh pergaulan antarbudaya, baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional, yang dalam studi budaya (*cultural studies*) disebut fenomena diaspora. Akibatnya, bahasa bukan lagi objek tunggal, melainkan sebagai bagian dari kehidupan manusia.

REFERENSI

- Aslinda; Syafyaha, Leni. 2007. *Pengantar Sosiolinguistik*. Bandung: Refika Aditama.
- Chaer, Abdul; Agustina, Leonie. 1995. *Sosiolinguistik, Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hidayat, Asep Ahmad. 2006. *Filsafat Bahasa, Mengungkap Hakikat Bahasa, Makna dan Tanda*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Ibnu Jinni, *al-Khashaa'ish* (Mesir: Daar el-kitab el-Mishri, 1957)
- Ibrahim, Abd. Syukur. 1995. *Sosiolinguistik, Sajian, Tujuan, Pendekatan dan Problem*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Jujun J. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001)
- Lingua, Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra volume 1/no. 2/Maret 2004.
- M. Fakih dalam pengantar Arwan Tuti Artha, *Bahasa dalam Wacana Demokrasi dan Pers* (Yogyakarta: AK Group, 2002)
- Mudjia Rahardjo, *Relung-relung Bahasa* (Yogyakarta: Aditya Media, 2002)
- Nababan, P.W.J. 1991. *Sosiolinguistik Suatu Pengantar*, Cet. I, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Norman Fairclough, *Language and Power* (New York: Longman, 1989)
- Pateda, Mansoer . 1991. *Linguistik Terapan*, Cet. I , Flores: Nusa Indah.
- Rahardjo, Mudjia. 2002. *Relung-relung Bahasa, Bahasa dalam Wacana Politik Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Ronald Wardaugh, *an Introduction to Linguistics* (New York: Basil Blackwell, 1986)
- Thomas, Linda ; Wareing, Shan. 2007. *Bahasa, Masyarakat & Kekuasaan*. Terj. Sunoto et. al., Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim (ed.), *Bahasa dan Kekuasaan Politik Wacana di Panggung Orde Baru* (Bandung: Mizan Pustaka,)